



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 26 April 2025

Halaman: 8

Besaran Kompensasi Rumah Sudah Disampaikan

JOGJA - Warga terdampak penataan Stasiun Lempuyangan, Jogja melakukan audiensi dengan anggota dewan di Gedung DPRD Kota Jogja, kemarin (25/4). Informasi besaran kompensasi telah diterima warga, namun sementara mereka masih menolak adanya pengurusan hingga ada audiensi dengan Keraton Jogja.

"Mereka berharap mendapat surat palilah Keraton Jogja. Padahal palilah itu *kan* tidak menyebutkan harus melakukan pengurusan warga," ujar Ketua RW 01 Kelurahan Bausasran Anton Handriutomo saat ditemui pascaaudiensi kemarin. Kedatangan mereka ke Gedung DPRD Kota Jogja juga untuk melaporkan adanya arogansi dari PT KAI atas rencana pengurusan itu. Ia menilai, langkah PT KAI semakin jauh, padahal audiensi warga dengan Keraton Jogja belum selesai.

Hal itu didasarkan atas adanya rencana pengukuran oleh petugas PT KAI di rumah warga. "Sultan selaku gubernur dan raja Jogja mengatakan, masalah warga dengan PT KAI akan dimediasi oleh Gusti Mangkubumi. Namun sampai hari ini (setelah pertemuan pertama) belum ada audiensi lagi," tuturnya.

Pengukuran dilakukan untuk menentukan besaran dana kompensasi. Bangunan yang akan diukur nanti merupakan bangunan di luar bangunan



AGUNG DWI PRAKOSO RADAR JOGJA
ANTON HANDRIUTOMO

utama atau tambahan. Informasi yang ia dapat, bangunan dengan batu bata besarnya Rp 250 ribu per meter persegi, semi permanen Rp 200 ribu per meter persegi.

"Mereka juga akan menyiapkan untuk transportasi seperti truk tambahan. Ketika saya tanya pindah ke mana, mereka tidak bisa menjawab," jelasnya.

Minggu depan ia juga akan melakukan audiensi dengan DPRD DIJ. Sampai saat ini statemen warga jelas bahwa mereka ingin mengurus keancingan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang mereka kantongi.

Dua perwakilan PT KAI mendatangi rumah Anton selaku Ketua RW pada Kamis (24/4) sore. Mereka menginformasikan akan ada sosialisasi di Kantor Kelurahan Bausasran pada Rabu (30/4).

"Mayoritas warga berkehendak *gitu* (tidak hadir dalam sosialisasi) sebelum ada audiensi dengan Keraton Jogja. Tapi nanti

keputusannya saya akan koordinasi dulu," terangnya.

Ketua DPRD Kota Jogja Wisnu Sabdono Putri yang ikut dalam audiensi mengatakan, tindak lanjut permasalahan warga dengan PT KAI akan dilakukan Komisi A. Rencana dewan akan memanggil PT KAI dan sidang ke lapangan. "Prinsipnya kami usahakan yang terbaik buat masyarakat terdampak," ujarnya.

Ia menyampaikan, keinginan dari warga yakni segala sesuatu dilakukan dengan musyawarah. Pihak PT KAI juga diimbau tidak melakukan hal hal yang bersifat arogan dan mau menang sendiri.

"Selama ini yang dialami warga informasinya seperti itu. Kalau akan dilakukan penataan, ya harus dengan musyawarah," tuturnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Indaruwanto Eko Cahyono merencanakan menggelar rapat komisi internal untuk menentukan langkah mulai Senin (28/4). Ia juga akan melibatkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispartaru) untuk menemukan solusi.

Hal itu karena Dispartaru diberikan kepercayaan oleh Panitikismo untuk menginventarisasi sultanaat ground (SG). "Kami akan sidang ke lapangan. Apa pun hasilnya, yang penting ketemu jalan tengahnya. Jangan sampai merugikan salah satu pihak, terutama masyarakat," tegasnya. (oso/laz/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005